

# **Analisa perlakuan Pajak atas reklame dinding di Provinsi DKI Jakarta (studi pada UPPD Kebayoran Baru dan Pasar Minggu) / Rendy Aditya Oktadi**

Rendy Aditya Oktadi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20321162&lokasi=lokal>

---

## **Abstrak**

### **<b>ABSTRAK</b><br>**

Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan reklame yang menggunakan media jenis baru. Pemerintah melakukan pengenaan pajak atas penyelenggaraan reklame dinding. Pokok permasalahan penelitian adalah perlakuan pajak yang diterapkan oleh Pemda terkait penyelenggaraan reklame dinding di DKI Jakarta dan faktor penghambat atas reklame dinding. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah perlakuan dasar penetapan pengenaan pajak penyelenggaraan reklame dinding termasuk ke dalam kategori reklame papan/billboard. Dalam persyaratan perizinan sama dengan persyaratan reklame papan, namun reklame dinding tidak membutuhkan persyaratan TLB ? BBR, IMB ? BBR dan izin pemasangan hanya dilakukan di UPPD Kecamatan. Faktor penghambat dengan adanya reklame dinding yaitu terdapat perbedaan persepsi pemerintah daerah dengan Wajib Pajak, pergeseran penerimaan daerah, dan estetika keindahan kota terganggu.

<hr>

### **<b>Abstract</b><br>**

The focus of this study is implementation of an advertising that uses a new type of media, the wall advertising. Government imposes a tax on the wall advertising. Subject of this research are tax treatment of wall advertising by local government administration in Jakarta and resisting factors in wall advertising. Researchers used a qualitative descriptive approach. The results are basis for tax treatment of implementation in wall advertising categorized on boards advertising / billboards. Licensing requirements of wall advertising is same with the licensing requirements of boards advertising / billboards, but the wall advertising do not require TLB ? BBR , IMB - BBR and installation permission only in UPPD subdistrict. Resisting factors are differences perception between local government and taxpayer, friction on local revenues, and disturbed the aesthetic of city.